



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ANY LINDAWATY
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 245454

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **3.140.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 203 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/45 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN RIAU, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
4. Tanah Seluas 296 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 146 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 545 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **132.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000



2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.  
7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	31.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	141.004.392
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.444.504.392
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.444.504.392

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.